

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kejahatan yang melintasi batas negara dan memanfaatkan celah dalam sistem hukum dalam dan keamanan negara lain untuk melakukan aktivitas kriminal yang melanggar lebih dari satu hukum dikenal sebagai kejahatan transnasional. Kejahatan seperti ini dapat berdampak pada negara tujuan dan negara lain yang terlibat. Perserikan Bangsa-bangsa (PBB) membuat istilah “kejahatan transnasional” untuk menggambarkan jenis kejahatan yang telah melampaui batas negara (Annisa, 2023). Kejahatan transnasional dapat dilakukan oleh kelompok kriminal terorganisir, seperti sindikat perdagangan narkoba atau jaringan penyelundup manusia yang berkolaborasi lintas batas, tetapi juga bisa dilakukan oleh individu atau kelompok kecil yang bekerja sama untuk melakukan aktivitas kriminal tertentu. Pada kasus *human trafficking* termasuk pula kejahatan transnasional dikarenakan bentuk aktivitas perdagangan manusia yang dilakukan melintasi batas negara.

*Human trafficking* menjadi bisnis ilegal sekaligus kejahatan yang mengerikan yang berkembang pesat. Perdagangan manusia sendiri saat ini sangat beragam dan mencakup berbagai rentang usia dan gender. *Trafficking* manusia memiliki banyak bentuk, termasuk perbudakan sebagai pekerja seks, pelanggaran seksual (perbudakan seksual), penjualan organ tubuh, pernikahan paksa, penjualan bayi, pengemis dan sebagainya (Simamora, 2022). Tentu kasus perdagangan manusia merupakan ancaman serius bagi kedamaian dan keamanan di seluruh dunia, dan negara-negara seperti Indonesia dan Thailand tidak luput dari dampaknya. Perdagangan manusia di ASEAN mengalami peningkatan signifikan terutama dengan penyalahgunaan teknologi untuk penipuan daring sehingga semakin mengkhawatirkan karena ASEAN merupakan wilayah yang menjadi sumber, transit, dan tujuan perdagangan manusia.

Faktor seperti kemiskinan, kesenjangan ekonomi, lemahnya penegakan hukum, serta tingginya permintaan tenaga kerja murah dan eksploitasi seksual menyebabkan kasus perdagangan manusia terus meningkat (Mugiono, Indradewi, & Achmad, 2024).

Seiring dengan perkembangan globalisasi dan kemudahan mobilitas antarnegara, ASEAN menjadi wilayah strategis bagi jaringan perdagangan manusia karena faktor geografis, sosial, dan ekonomi yang kompleks. Beberapa negara ASEAN seperti Thailand, Malaysia, Kamboja, dan Filipina menjadi tujuan utama bagi sindikat perdagangan manusia, baik sebagai tempat transit maupun lokasi eksploitasi korban (Astrid, 2011). Misalnya negara Thailand memiliki sektor pariwisata yang berkembang pesat yang turut meningkatkan risiko perdagangan manusia (Maulidia, 2022). Terutama dalam sektor eksploitasi seksual dan tenaga kerja murah. Sementara itu, Indonesia dan Myanmar sering menjadi negara asal bagi para korban yang dijanjikan pekerjaan layak di luar negeri tetapi akhirnya dieksploitasi dalam kondisi kerja yang tidak manusiawi. ASEAN telah berupaya menangani masalah ini melalui berbagai mekanisme, seperti ASEAN Convention Against Trafficking in Persons (ACTIP) dan kerja sama bilateral antarnegara. Namun, tantangan seperti koordinasi antar lembaga, korupsi, serta kesenjangan dalam sistem hukum masih menjadi kendala utama dalam memberantas perdagangan manusia di kawasan ini.

Thailand memiliki sektor pariwisata dan industri yang sangat berkembang, menyebabkan tingginya permintaan tenaga kerja, termasuk dari Indonesia. Banyak WNI yang bermigrasi ke Thailand untuk bekerja di sektor jasa perhotelan, dan industri perikanan. Namun, kurangnya regulasi dan pengawasan ketat membuat banyak tenaga kerja migran mengalami eksploitasi, seperti kerja paksa, upah rendah, dan kondisi kerja yang tidak manusiawi. Selain itu, jaringan perdagangan manusia juga memanfaatkan tingginya permintaan tenaga kerja dengan merekrut pekerjaan secara ilegal. Khususnya pada kawasan Asia Tenggara telah mengalami tingkat migrasi yang tinggi, khususnya migrasi intra-regional

sejak tahun 1980-an (Larsen, 2010). Faktor utama yang menyebabkan banyaknya korban perdagangan manusia dari Indonesia adalah rendahnya tingkat pendidikan dan tingginya angka kemiskinan. Banyak individu yang tertipu oleh agen tenaga kerja ilegal dengan iming-iming pekerjaan layak di luar negeri, termasuk di Thailand.

Kasus yang banyak terjadi menunjukkan bahwa korban sering kali tidak memiliki informasi yang cukup mengenai risiko perdagangan manusia. Pemerintah telah berupaya meningkatkan kesadaran melalui sosialisasi dan regulasi ketat terkait penempatan tenaga kerja, namun masih perlu strategi yang lebih efektif untuk melindungi warga negara dari jeratan perdagangan manusia (Kamudin, 2015). Dengan tingginya angka permintaan tenaga kerja dari Thailand maka dari itu banyak pekerja migran dari negara tetangga datang ke Thailand dengan harapan mendapatkan pekerjaan dengan gaji lebih baik (Hanri, Sholihah, & Satyagraha, 2024). Sayangnya, kondisi ini sering dimanfaatkan oleh sindikat perdagangan manusia yang menipu atau memaksa korban bekerja dalam kondisi eksploitasi. Sindikat perdagangan manusia di Indonesia dan Thailand beroperasi dalam jaringan yang kompleks dan terorganisir. Di Indonesia, banyak sindikat beroperasi dengan modus perekrutan tenaga kerja ilegal melalui agen-agen tidak resmi (Firmansyah, 2024). Sementara itu, di Thailand banyak sindikat yang bekerja sama dengan pihak tertentu dalam industri perikanan dan hiburan untuk menyediakan tenaga kerja ilegal. Hal tersebut tentu didukung oleh perbatasan laut kedua negara juga dekat dengan Teluk Thailand berbatasan dengan Indonesia dan Thailand (Putri & Gischa, 2021). Maka dari itu, dengan letak posisi kedua negara tersebut cukup dekat. Maka memudahkan bagi pelaku tindakan kejahatan melakukan aksinya. Negara Thailand telah lama menjadi destinasi populer wisatawan global. Sebagai pusat kehidupan malam yang terkenal, pesona alamnya yang memikat, dan warisan budayanya yang kaya telah menarik jutaan pengunjung setiap tahunnya. Namun, pertumbuhan pariwisata yang cepat membawa dampak yang tidak terduga. Layanan pariwisata seperti akomodasi, makanan, dan hiburan meningkat seiring dengan

jumlah wisatawan yang datang. Berdasarkan catatan dari databoks (portal data statistik ekonomi dan bisnis) tercatat bahwa pada tahun 2022 wisatawan asing yang datang berjumlah 11,15 juta hingga pada tahun 2024 tercatat 28,2 juta wisatawan asing yang datang ke Thailand.

Terkait pariwisata tentu berkaitan dengan tempat-tempat yang tersemat dalam budaya, ekonomi, dan kehidupan sosial masyarakat. Dalam pariwisata, produksi, konsumsi, dan karakteristik pengalaman saling terhubung dalam suatu lokasi tertentu (Saraniemi & Kylänen, 2011). Dengan kebutuhan layanan sektor pariwisata hal tersebut tentu memerlukan kebutuhan tenaga kerja di bidang terkait. Disisi lain, Thailand merupakan negara sumber, transit, dan tujuan korban perdagangan manusia. Banyak korban asal Thailand yang diperdagangkan ke luar negeri sementara para migran ilegal memasuki Thailand untuk mencari pekerjaan yang lebih baik atau memperbaiki keadaan mereka dan sayangnya menjadi korban perdagangan manusia. Eksploitasi perempuan dan anak-anak untuk seks dan migran untuk menjadi tenaga kerja, khususnya di industri perikanan komersial, sangat terkenal di Thailand. Karena jumlah orang yang dieksploitasi di masing-masing industri ini diperkirakan, tidak ada cara untuk mengetahui secara pasti berapa banyak orang yang hidup dalam kondisi yang sekarang disebut perbudakan modern. Perkiraananya berkisar dari 100.000 hingga jutaan (Hoelscher, 2017).

Meskipun lebih mudah untuk mengamati orang-orang yang bekerja di industri perdagangan seks, perdagangan orang untuk dijadikan tenaga kerja lebih luas dan sulit untuk diidentifikasi dan ditangani kecuali jika korban secara khusus memberitahukannya. Karena banyak korban perdagangan orang tidak memahami budaya dan bahasa di negara tujuan mereka, sebagian besar dari mereka enggan mengatakan apa pun kepada pihak berwenang karena takut akan konsekuensinya karena di Thailand, korupsi yang dilakukan oleh pejabat telah menyebabkan kedua industri tersebut berkembang. Indonesia telah diidentifikasi sebagai sumber utama orang yang diperdagangkan di wilayah Asia Tenggara, banyak seperti di dalam konteks dalam migrasi tenaga kerja dan seringkali tidak didokumentasikan (Larson, 2011).

Warga Indonesia yang seringkali menjadi korban dari kasus *human trafficking* dan jumlahnya yang kian meningkat. Berdasarkan data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) pada tahun 2021 tercatat 25.210 jumlah kasus hingga pada tahun 2023 tercatat 29.883 jumlah kasus.

Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Bangkok mencatat setidaknya 92 kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang melibatkan warga negara Indonesia (WNI) di perbatasan Thailand selama tahun 2022. Korban TPPO terutama berasal dari Pulau Kalimantan. Provinsi ini dianggap sebagai salah satu tempat terbaik untuk pergi ketika orang dikirim ke negara tujuan. Ada beberapa upaya telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk memusnahkan kasus tersebut dengan cara membuat Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Namun, hal tersebut masih belum efektif untuk memusnahkan peningkatan kasus ini dikarenakan bila ditelisik lebih jauh masih terdapat banyak faktor sosial mengapa warga Indonesia khususnya di Pulau Kalimantan masih menjadi korban dalam kasus tersebut. Seperti minimnya Pendidikan karena akses Pendidikan yang belum merata, sehingga hal tersebut mempengaruhi juga kedepannya bahwa pengangguran di wilayah tersebut meningkat. Termasuk juga ketidaksetaraan sosial (Nurul, Sagita, Permatasari, Tivanny, & Antoni). Menurut Cullen-Dupont (2009) faktor-faktor seperti kemiskinan, prostitusi, pariwisata seks, akses Pendidikan yang tidak memadai, dan bahkan korupsi adalah penyebabnya.

Dalam beberapa dekade terakhir, industri pariwisata Thailand telah menjadi yang tercepat di Asia Tenggara (Analisis Pengaruh Industri Pariwisata Terhadap Pendapatan Nasional Negara Thailand, 2022). Thailand memiliki budaya yang kaya, pantai yang indah, dan orang-orang yang ramah. Namun, sayangnya pertumbuhan pesat industri pariwisata telah dikaitkan dengan perdagangan manusia. Di Thailand, industri pariwisata dan perdagangan manusia terkait erat karena beberapa alasan seperti permintaan tenaga kerja murah, karena

sektor pariwisata semakin berkembang, sangat diperlukan banyak tenaga kerja, terutama tenaga kerja dengan upah rendah. Ini dapat mengarah pada praktik eksploitasi terhadap karyawan, termasuk perdagangan manusia. Selain itu industri pariwisata seringkali digunakan oleh sindikat kriminal untuk memperdagangkan manusia, terutama dalam bentuk perdagangan seksual dan pekerja paksa. Pada tahun 2022 BBC News Indonesia mengeluarkan berita bahwa terdapat kasus pasangan suami istri yang menjadi korban *human trafficking* di Thailand. Mereka ditipu oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, keduanya diselundupkan dan dijadikan pekerja sebagai penipu online dengan upah yang sangat kecil. Mereka dipaksa untuk berpura-pura sebagai orang sukses sehingga para korban melakukan investasi. Namun, tentu hal tersebut merupakan investasi bodong. Jika mereka tidak melakukan perintah yang disuruh, mereka akan dipukul sampai berdarah dan dijemur di bawah terik matahari dari jam 12 siang hingga jam 4 sore.

Maka dari itu, keuntungan yang didapatkan oleh pelaku terkait mendapatkan keuntungan yang besar. Sesuai dengan Protokol Perdagangan Orang PBB tahun 2000, perdagangan manusia didefinisikan sebagai perdagangan orang dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan moneter dan mencakup kasus-kasus kerja paksa, eksploitasi seksual, pengusuran organ tubuh dan pemindahan orang di luar kehendak mereka. Perdagangan manusia termasuk dalam tiga besar bisnis ilegal yang paling menguntungkan, hampir mencapai tingkat perdagangan senjata dan narkoba (Opanovych, 2016). Perdagangan manusia antara Indonesia dan Thailand merupakan isu yang signifikan, dan Thailand menjadi tujuan utama para pekerja yang diperdagangkan dari Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Industri perikanan dan seks merupakan pusat dari fenomena ini, namun perdagangan manusia juga dapat ditemukan di perkebunan karet dan beberapa pabrik. Keterputusan antara penawaran dan permintaan telah mengakibatkan peningkatan perdagangan manusia terhadap pekerja dari

negara-negara seperti Indonesia ke Thailand. Terjadi pula peningkatan perdagangan manusia dari Thailand ke Jepang dan Timur Tengah (von Feigenblatt, 2021).

Penelitian ini akan membahas status tingkatan Thailand dan cakupan masalah perdagangan manusia di Thailand. Penelitian ini kemudian berfokus pada agama Thailand karena agama tersebut memberikan landasan bagi eksploitasi perempuan dan anak-anak dalam industri seks. Penelitian ini diakhiri dengan tinjauan terhadap perekonomian, sistem politik, dan sistem sosial/budaya Thailand yang terkait dan mendukung perdagangan manusia (Hoelscher, 2017). Perdagangan manusia merupakan isu penting di negara-negara ASEAN, yang ditandai dengan eksploitasi dan kekerasan terhadap individu untuk kerja paksa dan eksploitasi seksual (Mohammad & Setyani, 2023). Kejahatan keji ini berdampak pada sekitar 40 juta pria, wanita, dan anak-anak yang terjebak dalam jaringan kerja paksa, eksploitasi seksual, dan pernikahan paksa. Kejahatan ini menghasilkan lebih dari \$150 miliar per tahun, menjadikannya salah satu kejahatan terorganisir yang paling menguntungkan di dunia. Mayoritas korban, atau 25 juta orang, berada di Asia Timur dan Pasifik. Upaya yang dilakukan oleh Indonesia dan Thailand telah melalui kerja sama bilateral. Kerja sama bilateral adalah dua negara bekerja sama satu sama lain dalam hal ekonomi, diplomatik, perdagangan, Pendidikan, dan kebudayaan (Fajri, 2022) Seperti ASEAN Chiefs of National Police (ASEANAPOL). Dampak perdagangan manusia sangat besar, menyebabkan masalah sosial, ekonomi, dan hak asasi manusia yang serius. Hal ini sebagian besar masih merupakan kejahatan tersembunyi, karena para korban sering kali enggan mencari bantuan karena takut akan intimidasi dan pembalasan (Caballero-Anthony, 2018).

## **B. Batasan dan Rumusan Masalah**

Dari sekian permasalahan diatas maka penulis menekankan pada maraknya kasus *human trafficking* dari Indonesia ke Thailand dengan melihat dampak kerugian yang terjadi

serta penanggulangan kasus tersebut baik dari Indonesia dan Thailand. Perlu dikaji lebih mendalam secara spesifik mengenai tingginya sindikat perdagangan manusia yang terjadi di Indonesia, terutama melalui pulau Kalimantan yang sangat dekat secara geografis dengan Thailand. Pertanyaan penelitian yang dapat dirumuskan adalah:

1. Bagaimana strategi kerja sama Indonesia-Thailand dalam mengatasi kasus *human trafficking* untuk menanggulangi ketenagaan kerja ?
2. Bagaimana dampak kasus *human trafficking* dari Kalimantan ke Thailand terhadap sektor pariwisata Thailand?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi dampak kasus *human trafficking* dari Kalimantan ke Thailand untuk menanggulangi ketenagaan kerja terhadap sektor pariwisata Thailand.
2. Untuk mengetahui strategi kerja sama Indonesia-Thailand dalam mengatasi kasus *human trafficking*.

Adapun manfaat dari penelitian yang dilakukan penulis sebagai berikut:

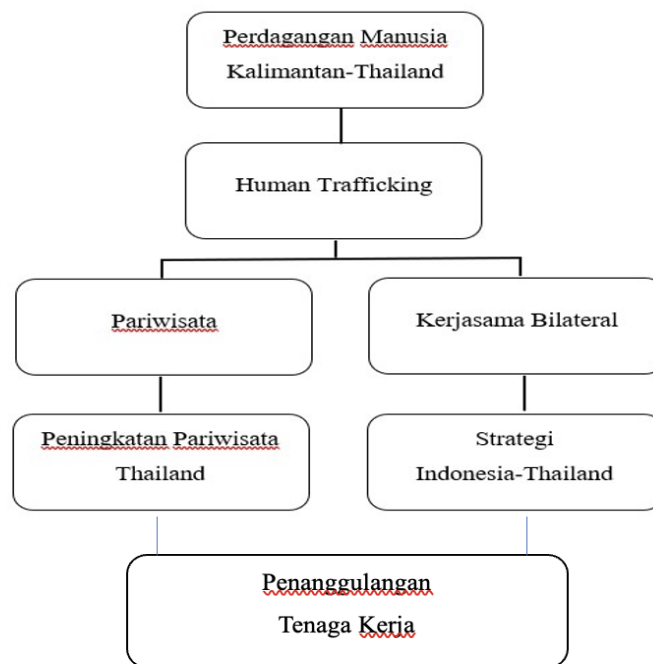
1. Dapat memberi manfaat keilmuan hubungan internasional dan isu *human trafficking* yang perlu disoroti dalam dunia hubungan internasional kepada penulis maupun khususnya mahasiswa dan mahasiswi prodi ilmu hubungan internasional.
2. Dapat digunakan sebagai referensi bagi penstudi ilmu hubungan internasional serta referensi bagi pemangku kepentingan baik pemerintah maupun instansi, untuk lebih memperhatikan isu *human trafficking* di lingkungan negara masing-masing.
3. Dapat memberikan temuan baru dalam mengkaji kasus *human trafficking* menggunakan konsep *human trafficking*, pariwisata dan kerja sama



bilateral.

#### D. Kerangka Konseptual

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan tiga konsep yaitu konsep *human trafficking*, pariwisata dan kerja sama bilateral untuk membantu dalam menjalankan penelitian ini.



*Gambar 1 1 Skema Kerangka Konseptual*

*Sumber: diolah oleh penulis*

#### 1. Human Trafficking

Perdagangan manusia adalah rekrutmen, transportasi, transfer, perlindungan, atau penerimaan orang dengan menggunakan ancaman atau penggunaan kekuatan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi yang rentan, pemberian atau penerimaan pembayaran atau

manfaat untuk mencapai persetujuan dari seseorang yang memiliki kendali atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi.

Eksplorasi minimal meliputi eksploitasi prostitusi orang lain atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja paksa berupa pelayanan, perbudakan dan penghapusan organ (Chibba, 2013). Setiap transaksi jual beli terhadap manusia disebut perdagangan manusia, juga dikenal sebagai perdagangan orang. National Human Trafficking Hotline Amerika Serikat mengacu pada perdagangan manusia, menurut lembaga non-pemerintah yang menangani kasus perdagangan manusia ketika pelaku menggunakan kekerasan, penipuan, atau paksaan untuk mengendalikan orang lain dengan tujuan melakukan komersialisasi seks atau meminta tenaga kerja atau layanan yang bertentangan dengan keinginannya, perdagangan manusia adalah salah satu kasus kejahatan yang terjadi di lintas negara.

Untuk pekerja seks di bawah 18 tahun, tidak diperlukan unsur kekerasan, penipuan atau paksaan, tetapi tetap dianggap sebagai tindak pidana perdagangan manusia. Dilihat dari paradigma realisme dalam menggunakan konsep yakni dapat dilihat sebagai suatu hal yang memfokuskan pada realitas sosial dan proses-proses mental dari tindakan sosial. Dalam paradigma realisme ini memahami bagaimana realitas sosial itu diciptakan dan bagaimana tindakan sosial (Natalia, 2017).

Selain itu, hal tersebut memfokuskan pada peran negara dalam menentukan keamanan dan kepentingan nasional. Dalam konteks perdagangan manusia, negara-negara yang terlibat, keterlibatan korban dan pelaku dalam perdagangan manusia dapat memengaruhi keamanan dan kepentingan nasional mereka sendiri (Simamora E. C., 2022). Konsep ini erat kaitannya dengan dampak sektor pariwisata Thailand terhadap peningkatan kasus perdagangan manusia dari Kalimantan ke Thailand. Beberapa poin penting yang perlu dipertimbangkan dapat dilihat bahwa industri pariwisata Thailand

merupakan kontributor yang signifikan terhadap perekonomian negara ini, namun juga menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perdagangan manusia. Masuknya wisatawan dan permintaan akan tenaga kerja murah dan layanan seksual memicu perdagangan ilegal manusia.

## **2. Pariwisata**

Pariwisata adalah fenomena yang memiliki banyak aspek dan kompleks yang melibatkan perpindahan orang ke tujuan di luar tempat tinggal normal mereka. Ini mencakup berbagai aspek aktivitas manusia, termasuk perjalanan, akomodasi, makanan dan minuman, atraksi dan hiburan (Geographic Book, n.d.). Dalam sebuah jurnal yang berjudul *Tourism industry in the world* bertuliskan “*Tourism is the business of attracting, accommodating, and entertaining tourists*” (Laylo, 2020). yang berarti bahwa pariwisata adalah bisnis yang bertujuan untuk menarik, mengakomodasi, dan menghibur para wisatawan. Hal ini mencakup serangkaian aktivitas yang dirancang untuk menarik orang untuk mengunjungi suatu tempat, menyediakan akomodasi untuk mereka selama mereka berada di sana, dan menyediakan berbagai kegiatan atau hiburan untuk memastikan pengalaman yang menyenangkan dan memuaskan bagi para wisatawan. Dengan kata lain, pariwisata adalah tentang menciptakan pengalaman positif bagi para pengunjung yang datang ke suatu destinasi. Berdasarkan peningkatan sektor pariwisata Thailand dikarenakan salah satunya yakni terdapat wisata seks di wilayah tertentu seperti Pattaya.

Seiring dengan pertumbuhan sektor pariwisatanya, terjadi peningkatan mobilitas penduduk antar negara. Wisatawan yang datang ke Thailand atau daerah lain cenderung membawa perubahan dalam dinamika sosial dan ekonomi lokal (Rizmayanti, 2022). Memahami hubungan antara konsep pariwisata dan fenomena kejahatan seperti perdagangan manusia karena dampak pariwisata Thailand terhadap peningkatan kasus

perdagangan manusia dari Kalimantan ke Thailand. Selama beberapa dekade terakhir, pariwisata Thailand telah berkembang pesat, menarik jutaan turis dari seluruh dunia, menjadikannya salah satu destinasi pariwisata utama Asia Tenggara (Horn, 2024). Namun pertumbuhan ini tidak selalu berdampak positif, terutama terkait dengan peningkatan kasus perdagangan manusia.

Beberapa hal dapat menjelaskan korelasi antara peningkatan pariwisata Thailand dan perdagangan manusia. Pertama, pertumbuhan industri pariwisata dapat menyebabkan lapangan kerja yang tidak stabil dengan gaji yang rendah (Prinasari, 2022). Dimana dapat mendorong individu untuk mencari pekerjaan ilegal di luar negeri misalnya Thailand. Kedua, jaringan manusia dapat menggunakan peningkatan mobilitas lintas batas yang disebabkan oleh pariwisata untuk memindahkan korban dari Kalimantan ke Thailand. Dalam konteks ini, konsep pariwisata berkesinambungan dengan ide bahwa ada ketergantungan ekonomi dan sosial antara destinasi pariwisata dari Thailand dan tempat asal korban yakni Kalimantan. Thailand menarik wisatawan tetapi juga orang yang mencari pekerjaan atau kesempatan finansial. Sebaliknya, ekonomi mungkin tidak stabil di Kalimantan, membuatnya menjadi tempat orang yang rentan terhadap perdagangan manusia.

### **3. Kerja sama Bilateral**

Menurut KJ Hosti, hubungan bilateral terbentuk karena konflik yang terjadi selama interaksi. Konflik ini menyebabkan hubungan yang serius, bukan hanya persaingan. Kerja sama bilateral mengacu pada pertukaran informasi, pengalaman, dan praktik terbaik mengenai hukum dan kebijakan persaingan antara dua negara berdaulat atau badan internasional. Hal ini melibatkan perjanjian langsung dan formal antara kedua pihak, seringkali dalam bentuk *Memorandum of Understanding* (MoU), dan digunakan untuk memfasilitasi dialog dan kerja sama dalam berbagai isu seperti

masalah ekonomi, budaya, atau politik. Kerja sama bilateral adalah antara dua entitas yang bertindak sebagai negara, seperti yang ditunjukkan oleh rasa ketergantungan satu negara terhadap negara lain. Salah satu negara akan runtuh jika tidak memiliki hubungan (Munatama & Zhaidah, 2023).

Ketika dua objek bekerja sama, itu disebut dengan kerja sama bilateral. Ini melibatkan dua pihak yakni negara dan individu. Terdapat asumsi bahwa ada rasa saling membutuhkan antara negara. Dikarenakan, suatu negara tidak dapat bertahan hidup tanpa hubungan diplomatik (Amalia, 2018). Kusumo Hamidjojo mendefinisikan kerja sama bilateral sebagai kerja sama di antara negara yang berdekatan secara geografis atau jauh di seberang lautan dengan tujuan utama menciptakan perdamaian dengan mempertimbangkan kesamaan politik, kebudayaan, dan struktur ekonomi. Untuk mengatasi efek negatif dari pertumbuhan sektor pariwisata Thailand terhadap peningkatan kasus dari Kalimantan ke Thailand, kerja sama bilateral digunakan sebagai sebagai konsep dalam melibatkan kerja sama antara Thailand dan Indonesia. Konsep ini meliputi pertukaran informasi intelijen, peningkatan pengawasan di perbatasan, serta penegakan hukum yang lebih ketat terhadap jaringan perdagangan manusia.

Selain itu, dalam proses menghentikan perdagangan manusia dari Kalimantan ke Thailand, konsep kerja sama bilateral Indonesia dan Thailand memiliki banyak aspek yang berbeda. Dimulai dari kolaborasi ini memungkinkan kedua negara untuk lebih banyak berbagi informasi tentang cara menemukan dan menindaklanjuti jaringan perdagangan manusia. Untuk menjamin penegakan hukum yang efektif di kedua sisi perbatasan lembaga penegak hukum, imigrasi, dan instansi terkait lainnya harus bekerja sama. Kerja sama bilateral yang dilakukan oleh kedua negara tersebut yakni IT-BWG on Trafficking in Persons (*Indonesia-Thailand Bilateral Working Group on Trafficking*

*in Persons*). Kerja sama tersebut didirikan pada tanggal 29 Maret 2006 yang bertujuan untuk meningkatkan dalam penanganan kasus antara Indonesia dan Thailand.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Penulis menggunakan tipe penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif diawali dengan ide dalam pertanyaan penelitian. Metode pengumpulan data dan cara analisisnya ditentukan oleh pertanyaan penelitian tersebut. Dalam hal ini, penulis akan menjelaskan dampak peningkatan kasus dari Kalimantan ke Thailand terhadap sektor pariwisata Thailand serta mengolahnya secara deskriptif.

Penelitian kualitatif bersifat deskriptif analitik dan dinamis, yang artinya selalu terbuka untuk penambahan dan perubahan selama proses analisisnya (Srivastva & Thomson, 2009). Metode pengumpulan data kualitatif dari analisa visual, observasi, dan studi pustaka, yang kemudian dikumpulkan untuk dianalisis agar dapat dipahami dan menghasilkan suatu kesimpulan berupa pemaparan tentang fenomena yang diteliti, kemudian disajikan dalam format uraian naratif.

### **2. Jenis Data**

Jenis data yang akan digunakan oleh penulis adalah data primer dan data sekunder. Data yang telah ada sebelumnya akan digunakan untuk kelengkapan data penelitian. Jenis data sekunder mudah diakses karena kebanyakan datanya bersumber dari publikasi seperti buku, artikel jurnal, situs web, dan sumber sejenisnya. Penulis akan menggunakan data sekunder yang berkaitan dengan dampak pertumbuhan sektor pariwisata Thailand terhadap peningkatan kasus dari Kalimantan ke Thailand.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah metode wawancara dan Library Research. Data-data yang diperoleh dari berbagai sumber yang berkaitan dengan judul penelitian. Sumber berupa buku, artikel dan jurnal, dokumen dan berita tentang proyek, dan media lainnya baik yang berbentuk cetak maupun elektronik.

### **4. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan penulis adalah teknik analisis kualitatif. Data-data yang diperoleh digunakan untuk menganalisis dan mengumpulkan fakta dalam suatu permasalahan, kemudian mengaitkan fakta yang satu dengan fakta yang lain sehingga menghasilkan kesimpulan tujuan. Penulis akan mengumpulkan fakta-fakta yang bersumber dari data yang terkait dengan dampak pertumbuhan sektor pariwisata Thailand terhadap peningkatan kasus dari Kalimantan ke Thailand.

### **5. Metode Penulisan**

Metode penulisan yang digunakan penulis adalah metode deduktif. Penulis akan memberikan gambaran umum tentang masalah penelitian, kemudian merincikan permasalahan lalu membuat suatu kesimpulan dari berbagai data hasil penelitian.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini, akan dilakukan penjabaran penjelasan dengan berfokus pada kedua variabel yakni pada variabel dependent dan variabel independent. Untuk mencapai tujuan ini, perlu adanya pemahaman yang mendalam mengenai konsep-konsep yang terkait dengan perdagangan manusia, kerja sama bilateral, dan pariwisata. Bab ini penulis akan mengulas berbagai literatur dan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian ini. Pertama, akan dibahas mengenai definisi dan karakteristik human trafficking, serta faktor-faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya praktik ilegal ini. Kedua, tinjauan Pustaka akan mengulas mengenai sektor pariwisata, khususnya di Thailand, serta bagaimana pertumbuhan pariwisata dapat berdampak pada peningkatan kasus perdagangan manusia. Ketiga, akan dibahas mengenai pentingnya kerja sama bilateral antara Indonesia dan Thailand dalam upaya pencegahan dan penanggulangan perdagangan manusia.

Tinjauan pustaka ini diharapkan dapat memberikan landasan teoritis yang kuat serta mendukung analisis penulis dalam penelitian ini. Dengan memahami berbagai aspek yang terkait dengan topik penelitian, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara pertumbuhan pariwisata dan peningkatan kasus *human trafficking*, serta upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasinya. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

#### **A. Human Trafficking**

Menurut *National Human Trafficking Hotline* (NHTH) perdagangan manusia adalah bentuk perbudakan modern. Ini melibatkan penggunaan kekerasan, penipuan,



atau paksaan untuk mengeksploitasi orang untuk pekerjaan atau tindakan seksual komersial. Perdagangan manusia dianggap sebagai bentuk perbudakan tradisional telah lama dihapuskan. Menurut Mina Chang selaku pakar kebijakan publik dan keamanan global yakni perdagangan manusia adalah praktik ilegal yang melibatkan eksploitasi orang melalui kekerasan, paksaan, atau penipuan untuk tujuan kerja paksa atau eksploitasi seksual. Ini adalah bentuk perbudakan modern yang menghilangkan hak asasi dan kebebasan individu (Chang, 2015). Perbudakan di zaman modern terjadi karena adanya berbagai kondisi perburuhan yang eksploitatif (Lee, 2005). Dalam konteks ini, orang-orang dipaksa bekerja atau dieksploitasi tanpa keinginan mereka sendiri. Sehingga konsekuensi yang dirasakan oleh korban perdagangan manusia kehilangan kebebasan pribadi dan hak-hak dasar mereka. Karena mereka diperlakukan sebagai barang atau komoditas oleh para pelaku. Korban diperlakukan sebagai *property* dan dipaksa untuk bekerja tanpa bayaran. Dipaksa bekerja dalam kondisi yang tidak aman dan tidak sehat, dengan jam kerja yang panjang, tanpa hak untuk berhenti atau meninggalkan pekerjaan mereka. Dalam penggunaan kekerasan terdapat berbagai macam bentuk kekerasan fisik seperti pemukulan, penyiksaan, atau ancaman kekerasan, digunakan untuk mengontrol dan menundukkan korban yang tujuan utama penggunaan kekerasan ini adalah untuk memaksa korban untuk patuh dan tidak mencoba melarikan diri atau melaporkan pelaku. Pelaku kejahatan ini biasanya terdiri dari sindikat yang luas dan terorganisir dengan pengaruh global.

Menurut Kevin Bales perdagangan manusia adalah proses di mana seseorang dipaksa atau ditipu untuk bekerja dalam kondisi yang menyerupai perbudakan, di mana kebebasan mereka dirampas dan mereka dieksploitasi untuk keuntungan orang lain (Bales, 2007). Dalam bentuk penipuan, pelaku sering kali menipu korban dengan janji pekerjaan yang baik, pendidikan, atau kehidupan yang lebih baik. Penipuan ini bisa

termasuk kontrak kerja palsu atau informasi yang menyesatkan mengenai kondisi pekerjaan. Penipuan ini menyebabkan korban rela mengikuti pelaku, tanpa mengetahui risiko dan eksploitasi yang akan mereka hadapi. Dalam bentuk paksaan, dapat berupa ancaman terhadap korban atau keluarganya, penyalahgunaan kekuasaan, atau ancaman untuk melaporkan korban kepada pihak berwenang misalnya, jika korban adalah imigran ilegal. Teknik pelaku yang sering digunakan yakni manipulasi psikologi dan emosional untuk membuat korban merasa mereka tidak punya pilihan lain selain mematuhi perilaku. Dalam proses dan mekanisme para pelaku sering menggunakan iklan pekerjaan palsu, agen perekrutan, atau orang yang dikenal korban untuk menjebak korban. Mereka menjanjikan pekerjaan yang baik, pendidikan, atau kehidupan yang lebih menarik. Setelah direkrut, korban sering dipindahkan ke lokasi yang berbeda, baik di dalam negeri maupun lintas batas internasional. Pelaku menggunakan metode penyelundupan yang canggih untuk menghindari deteksi oleh pihak berwenang. Korban dipaksa bekerja dalam kondisi yang sangat buruk setelah tiba di lokasi tujuan. Pelaku memperbudak korban dengan menggunakan kekerasan fisik, ancaman, penipuan dan manipulasi emosional. Perdagangan manusia sejauh ini merupakan tindak pidana yang paling berbaya, menyerupai tindak pidana perdagangan manusia lainnya sulit untuk diselidiki dan dituntut (Pinatih, 2023).

Untuk memahami fenomena perdagangan manusia, penting untuk melihat bukan hanya tindakan yang terjadi, tetapi juga mekanisme yang mendasari tindakan tersebut. Teori eksploitasi, yang sangat relevan untuk mengkaji bagaimana orang atau kelompok memanfaatkan kerentanan orang lain untuk mendapatkan keuntungan finansial atau kekuasaan. Dengan menggunakan teori ini sebagai lensa dapat lebih memahami dinamika dan komponen yang berkontribusi pada perdagangan manusia. Disisi lain pula dapat memahami strategi yang digunakan pelaku untuk menjaga kontrol

atas korban. Berikut ini adalah penjelasan lebih lanjut tentang hubungan antara gagasan tentang *human trafficking* dan teori eksploitasi,

#### **a. Teori Eksploitasi**

Erik Olin Wright mendefinisikan eksploitasi sebagai hubungan sosial di mana satu kelompok mengambil keuntungan dari tenaga kerja kelompok lain dengan cara yang merugikan kelompok yang dieksploitasi. Eksploitasi ini melibatkan distribusi yang tidak adil dari hasil kerja dan kekuasaan (Wright, 1997). Karl Marx berpendapat bahwa teori eksploitasi adalah proses di mana kelas kapitalis memperoleh lebih banyak nilai dari kerja kaum proletar. Dalam sistem kapitalis, pekerja tidak dibayar sesuai dengan nilai penuh kerja mereka dan selisih ini merupakan sumber keuntungan bagi kapitalis (Marx, 1867). Teori eksploitasi sangat relevan dalam memahami *human trafficking* karena perdagangan manusia adalah bentuk eksploitasi yang ekstrem. Beberapa cara di mana teori eksploitasi dapat diterapkan untuk menganalisis *human trafficking*. Dimulai dari penggunaan kekerasan dan ancaman, penipuan dalam perekrutan dan paksaan psikologis. Berikut adalah penjabaran lebih rinci mengenai elemen-elemen utama dari teori eksploitasi dan bagaimana diterapkannya dalam konteks perdagangan manusia:

- 1. Kekerasan dan Ancaman :** Pelaku sering menggunakan kekerasan fisik untuk mengontrol dan menakut-nakuti korban. Bentuk kekerasan ini dapat berupa pemukulan, penyiksaan bahkan pemaksaan fisik lainnya yang membuat korban tidak berdaya dan takut melarikan diri. Selain kekerasan fisik langsung, ancaman kekerasan terhadap korban atau keluarga mereka digunakan untuk menjaga kontrol dan memastikan kepatuhan korban. Tentu dengan ancaman ini menciptakan rasa takut yang mendalam, sehingga korban merasa terjebak dalam situasi mereka.

2. **Penipuan dalam perekrutan :** Banyak korban direkrut melalui janji pekerjaan yang menggiurkan atau kehidupan yang lebih baik. Namun, setelah tiba di tempat tujuan, mereka mendapati bahwa pekerjaan yang dijanjikan tidak ada dan mereka dipaksa bekerja dalam kondisi yang sangat buruk atau dalam industri seks komersial. Termasuk pelaku sering kali menahan dokumen identitas korban, seperti paspor atau kartu identitas untuk mencegah korban melarikan diri atau mencari bantuan (Organization, 2017). Hal tersebut membuat korban sangat bergantung pada pelaku dan memperkuat kontrol pelaku atas mereka.
3. **Paksaan Psikologis :** Pelaku menggunakan berbagai teknik manipulasi psikologis untuk mengendalikan korban, termasuk *gaslighting* yang mana membuat korban meragukan realitas mereka sendiri, isolasi sosial bahkan menciptakan ketergantungan emosional atau finansial. Banyak korban berada dalam situasi keuangan yang sulit sebelum mereka direkrut dan pelaku memanfaatkan situasi ini dengan memberikan utang palsu atau tidak membayar upah yang layak. Ketergantungan finansial ini membuat korban sulit melarikan diri dari situasi eksploitatif.

Dalam penjelasan teori eksploitasi, telah diuraikan bagaimana teori ini memberikan wawasan yang mendalam mengenai mekanisme kontrol dan dominasi yang digunakan oleh pelaku perdagangan manusia. Menurut teori eksploitasi, kerentanan seseorang dimanfaatkan melalui kekerasan, penipuan, dan paksaan untuk keuntungan ekonomi pelaku. Dengan memahami teori eksploitasi membantu menemukan tanda-tanda perdagangan manusia dengan lebih baik dan membuat intervensi yang lebih baik untuk melindungi korban.

## **B. Pariwisata**

Menurut ahli terkemuka di bidang pariwisata dan kebijakan pariwisata internasional yakni David L. Edgell Sr. mendefinisikan bahwa pariwisata adalah industri global yang beragam yang melibatkan perjalanan dan layanan yang mendukungnya, termasuk transportasi, akomodasi, makanan & minuman, atraksi, dan hiburan yang disediakan untuk pelancong bisnis dan rekreasi (Sr, 2006). Dianggap sebagai salah satu sektor terbesar di dunia, pariwisata memiliki banyak *sub-sector* yang saling berhubungan. Perjalanan dan berbagai layanan pendukung merupakan bagian dari industri ini. Pariwisata mencakup semua jenis perjalanan, baik itu untuk rekreasi, bisnis, kuliah, atau tujuan lainnya. Ini mencakup perjalanan dalam negeri dan internasional.

Sektor pariwisata melayani berbagai jenis pengunjung dengan berbagai tujuan. Seperti halnya dengan pelancong rekreasi yang mana mereka yang bepergian untuk bersantai, menikmati liburan, dan berpartisipasi dalam aktivitas rekreasi. Sepakat dengan apa yang didefinisikan oleh Richard W. Butler bahwa pariwisata adalah aktivitas yang melibatkan perjalanan dan tinggal sementara di tempat-tempat di luar lingkungan biasanya. Ini dapat terjadi untuk tujuan rekreasi, bisnis, atau tujuan lain, serta berdampak pada ekonomi, lingkungan, dan masyarakat setempat (Butler, 1980). Selain menghasilkan peningkatan ekonomi dan budaya, industri pariwisata memiliki banyak efek negatif yang perlu dipertimbangkan secara menyeluruh. Pariwisata seksual adalah salah satu fenomena yang sering kali tersembunyi di balik sinar matahari industri pariwisata yang luar biasa. Pariwisata seksual berdampak pada masyarakat tujuan secara keseluruhan, termasuk individu yang terlibat secara langsung, serta sistem sosial, ekonomi, dan hukum. Berikut ini adalah penjelasan lebih lanjut tentang hubungan antara gagasan tentang pariwisata dan teori pariwisata dan kejahatan.

### **a. Teori Pariwisata & Kejahatan**

Menurut Ryan & Kinder teori ini menyatakan bahwa pariwisata menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kejahatan karena adanya pergerakan orang dalam jumlah besar, lemahnya pengawasan sosial, serta peluang ekonomi yang menarik bagi pelaku kejahatan. Menurut Brunt & Hambly berpendapat bahwa wisatawan sering menjadi target kejatan karena dianggap sebagai individu yang kurang waspada dan membawa barang berharga, sehingga menarik bagi pelaku kriminal. Dalam hal tersebut didukung pula oleh *Routine Activity Theory* yang menyatakan bahwa kejahatan terjadi ketika aspek terpenuhi yakni pelaku kejahatan yang termotivasi, korban potensial yang rentan, dan kurangnya pengawasan atau perlindungan terhadap korban. Perlindungan hak asasi manusia berakar pada jaminan hukum, dan hukum mencerminkan norma-norma masyarakat yang harus menjunjung tinggi martabat manusia. Idealnya, sistem hukum tidak sekedar berfungsi sebagai alat kekuasaan, namun juga harus berfungsi sebagai instrumen keadilan dan perlindungan (Saffanah, Rasito, Putra, & Yuliatin, 2024). Hukum yang berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan menjaga martabat manusia dan mewujudkan prinsip keadilan, keadilan, dan penghormatan terhadap individu (Angkasa, Hendriana, Wamafma, Juanda, & Nunna, 2023).

Terdapat sebuah buku yang berjudul “Kejahatan dan Pariwisata” yang ditulis oleh Joan Charlotte Angelie, Tolib Effendi, dan Aprilia Nuraini. Buku ini diterbitkan oleh Scopindo Media Pustaka pada tahun 2023 yang membahas mengenai hubungan kompleks antara kejahatan dan sektor pariwisata. Beberapa yang menjadi bagian penting dalam buku tersebut yakni mengupas perbedaan antara istilah dan kejahatan dan tindak pidana, dijelaskannya bahwa kejahatan adalah perilaku yang melanggar norma sosial dan hukum, sedangkan tindak pidana adalah perbuatan yang diatur dalam Undang-Undang dan dapat dikenakan sanksi hukum. Selain itu buku ini membahas

tipologi kejahatan serta faktor-faktor penyebabnya dengan pendekatan kriminologi. Ketiga penulis tersebut mengidentifikasi berbagai jenis kejahatan yang sering terjadi di daerah wisata, seperti pencurian, penipuan, dan kekerasan. Selain itu, buku ini juga menganalisis faktor-faktor yang memicu terjadinya kejahatan dalam konteks pariwisata termasuk kondisi sosial ekonomi, budaya lokal, serta pengaruh globalisasi. Dengan adanya globalisasi, batas-batas negara menjadi hal yang biasa untuk dilintasi sehingga memudahkan sindikat perdagangan manusia untuk menargetkan korban yang mereka inginkan (Dina & Kusumaningrum, 2023). Menurut Siegrid Tautz, Angela Bahs dan Sonja Wolthe (2006) mengemukakan bahwa penyebab maraknya kasus *trafficking* disebabkan karena terbukanya perbatasan timur dan barat pasca Perang Dingin dan meningkatnya globalisasi ekonomi yang menyebabkan kasus *trafficking* dan eksploitasi anak meningkat pesat di Asia dan Afrika. Keberadaan fenomena ini sudah banyak terjadi di berbagai negara, khususnya negara-negara berkembang seperti salah satu contohnya yakni Thailand, Dimana negara tersebut masih berkembang di Asia Tenggara yang mempunyai tingkat kasus perdagangan manusia yang tinggi. Dalam hal ini, peristiwa ini merupakan peristiwa yang sangat krusial.

Dalam konteks tersebut berdasarkan judul skripsi penulis, konsep dan teori pariwisata & kejahatan yang digunakan relevan. Dikarenakan dengan pertumbuhan pariwisata tentunya menyediakan peluang untuk kejahatan. Dengan perkembangan pesat pariwisata Thailand menciptakan lingkungan yang mendukung bagi berbagai jenis kejahatan termasuk perdagangan manusia dan *scammer online*. Wisatawan yang terus datang dalam jumlah besar dan tenaga kerja yang tidak terdeteksi menciptakan ruang bagi aktivitas kriminal, seperti pekerjaan paksa dan penipuan. Dalam teori ini menyatakan bahwa wisatawan sering menjadi target kejahatan karena mereka sering tidak memiliki pemahaman tentang keamanan lokal. Misalnya para sindikat

perdagangan manusia (*scammer online*) sering memanfaatkan kerentanannya untuk menarik korban, sementara industri pariwisata menyediakan peluang untuk eksploitasi seksual dan pekerja paksa yang digunakan dalam kejahatan-kejahatan ini. *Scammer Online* sering menggunakan sektor pariwisata sebagai penyamaran untuk menyelundupkan tenaga kerja ilegal atau memperdagangkan korban.

### **C. Kerja sama Bilateral**

Seorang ahli dalam bidang hubungan internasional dan teori politik yang bernama Stephen D. Krasner mengemukakan bahwa kerja sama bilateral adalah bentuk interaksi antara dua negara yang dirancang untuk mengatasi isu-isu spesifik dan mencapai tujuan bersama melalui negosiasi dan kesepakatan formal, yang bertujuan untuk meningkatkan hubungan diplomatik, ekonomi, dan politik antara kedua negara tersebut (Krasner, 1999). Joseph S. Nye melihat kerja sama bilateral sebagai mekanisme penting dalam hubungan internasional di mana dua negara saling berkomitmen untuk bekerja sama dalam berbagai bidang seperti keamanan, ekonomi, budaya, dan lingkungan dengan tujuan memperkuat stabilitas regional dan global (Nye, 2004). Dalam pandangan Henry Kissinger pula bahwa kerja sama bilateral adalah alat penting dalam diplomasi di mana dua negara berusaha untuk memperkuat hubungan mereka dan mengelola perbedaan melalui dialog dan negosiasi yang berkelanjutan (Kissinger, 1994). Menurut Charles W. Kegley & Eugene R. Wittkopf kerja sama bilateral adalah hubungan diplomatik antara dua negara yang berusaha untuk mengelola hubungan mereka melalui komunikasi langsung, perjanjian, dan kerja sama dalam berbagai isu seperti keamanan, perdagangan, dan budaya (Kegley & Wittkopf, 2005).

Kerja sama bilateral adalah elemen kunci dalam diplomasi dan hubungan internasional, memainkan peran penting dalam mengelola hubungan antara negara-negara. Dengan



berbagai definisi dari beberapa pendapat ahli dapat dikatakan bahwa konsep kerja sama bilateral adalah proses multifaset yang mencakup berbagai aspek formal, sosial, dan diplomatik. Disisi lain berisi tentang pentingnya struktur dan kesepakatan formal dalam membentuk dasar kerja sama, disisi lain pula ditekankan bahwa pentingnya pragmatisme dan negosiasi dalam mengelola perbedaan dan mencapai tujuan bersama. Penulis menggunakan konsep kerja sama bilateral ini supaya dapat menghargai kompleksitas dan esensialnya kerja sama bilateral dalam mencapai stabilitas dan kemakmuran global.

#### D. Penelitian Terdahulu

Penulis akan membahas beberapa penelitian kualitatif sebelumnya yang berkaitan dengan aspek perdagangan manusia dalam skripsi ini. Tujuan dari peninjauan ini adalah untuk memberi penulis lebih banyak referensi dan memperjelas bagian mana penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya. Untuk menyelesaikan masalah yang kompleks ini, penjabaran penelitian sebelumnya akan fokus pada sektor pariwisata yang merupakan salah satu sumber perdagangan manusia. Berikut literatur tersebut sebagai berikut:

Penelitian pertama yang ditulis oleh Ahmad Idris Al-Hammad yang berjudul *“Analysis of Indonesian and Thai Government Policies in Handling Human Trafficking Cases (2021-2023)”* diterbitkan pada bulan Januari 2025. Dalam jurnal tersebut berisikan tentang perdagangan manusia merupakan kejahatan transnasional yang serius dan melanggar hak asasi manusia. Indonesia dan Thailand terletak di wilayah Asia Tenggara. Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar di ASEAN yang mana merupakan pemasok tertinggi kasus-kasus tersebut terutama dari pekerja migran (Monique & Puspawarni, 2020). Pada saat yang sama, Thailand mempunyai posisi strategis sebagai negara asal, transit, dan tujuan banyak proses perdagangan manusia dari waktu ke waktu (Davy, 2014). Oleh karena itu, kedua negara memiliki tanggung jawab untuk mencegah dan memberantas

kejahatan ini. Penelitian yang menggunakan *Advocacy Coalition Framework (ACF)* yang mengungkap bahwa meskipun kedua negara telah menerapkan berbagai kebijakan, tantangan seperti koordinasi yang lemah, korupsi, dan kurangnya sumber daya masih menghambat efektivitasnya. Peran kelompok kepentingan juga berpengaruh dalam implementasi kebijakan. ACF sendiri bertujuan untuk meningkatkan literatur mengenai perumusan kebijakan dengan mengatasi kebutuhan-kebutuhan tertentu yang teridentifikasi (Weible, et al., 2011).

Penelitian kedua yang berjudul *“Human Trafficking Issue in ASEAN Countries: A Discussion to Overcome”* diterbitkan pada tahun 2023. Dalam jurnal tersebut membahas tentang isu perdagangan manusia yang signifikan di negara-negara ASEAN. Membahas mengenai cara untuk mengatasi kasus-kasus tersebut, Dijelaskannya penyebab utama *human trafficking* di ASEAN, seperti kemiskinan dan ketidaksetaraan ekonomi sehingga menjadikan faktor pendorong utama terjadinya fenomena tersebut. Selain itu, kurangnya kesadaran dan edukasi serta, lemahnya penegakan hukum di beberapa negara yang termasuk pula sistem peradilan yang korup memperburuk situasi. Tak lupa, dikarenakan permintaan tinggi untuk tenaga kerja murah dan eksploitasi seksual. Misalnya, permintaan akan tenaga kerja murah, terutama di sektor-sektor seperti perikanan, konstruksi, dan domestik mendorong perdagangan manusia di wilayah ini. Selanjutnya membahas mengenai dari adanya kebijakan strategi ASEAN yang mencakup adopsi konvensi dan deklarasi internasional, serta implementasi kebijakan di tingkat nasional dan regional. Disebutkan negara-negara seperti Thailand, Indonesia, Filipina, Malaysia, dan Vietnam merupakan negara-negara yang paling berpengaruh dalam isu perdagangan manusia di ASEAN. Indonesia yang mengadopsi terkait kebijakan di tingkat nasional maupun mengadopsi konvensi internasional, begitupun Filipina dan Vietnam merupakan negara yang terkena dampak isu perdagangan manusia. Thailand yang dikenal sebagai salah satu

negara yang memiliki tingkat korban perdagangan manusia dan Malaysia memiliki kebijakan efektif dalam mengatasi isu tersebut.

Penelitian ketiga berasal dari buku ***“Perdagangan Manusia di Asia Tenggara: Fenomena, Penanganan, dan Respons Regional”***. Dalam buku tersebut membahas mengenai lebih dalam tentang fenomena perdagangan manusia di Asia Tenggara, dengan fokus pada Thailand. Pada bab tersebut menjelaskan bahwa faktor-faktor seperti kemiskinan, lemahnya penegakan hukum, dan tingginya permintaan tenaga kerja ilegal menjadi pendorong utama terjadinya perdagangan manusia di kawasan tersebut. Wilayah perbatasan Thailand sering menjadi titik transit bagi korban perdagangan manusia, terutama dari negara-negara tetangga. Thailand yang menghadapi tantangan besar dalam menangani kasus-kasus perdagangan manusia. Meskipun ada berbagai upaya pemerintah untuk memperketat pengawasan dan meningkatkan perlindungan bagi pekerja migran, masih terdapat banyak hambatan yang membuat upaya ini kurang efektif. Beberapa inisiatif regional, seperti kerja sama ASEAN dan penerapan Konvensi ASEAN Melawan Perdagangan Manusia (ACTIP), diharapkan dapat membantu mengurangi kasus perdagangan manusia. Selain itu, peran organisasi internasional seperti IOM juga disebutkan dalam mendukung upaya regional untuk memerangi perdagangan manusia. Ditekankan kembali bahwa meskipun sudah ada langkah-langkah signifikan yang diambil oleh pemerintah Thailand dan regional ASEAN, tantangan dalam penegakan hukum, koordinasi antar negara, dan perlindungan korban masih memerlukan perhatian lebih agar dapat mengurangi dampak perdagangan manusia di kawasan tersebut.

Penelitian keempat yakni yang berjudul ***“Peran International Organization for Migration (IOM) dalam Menanggulangi Perdagangan Manusia di Thailand Tahun 2021-2023”***. Ditulis oleh Risma Nur Afriyani, Agus Subagyo, dan Anggun Dwi Panorama yang diterbitkan dalam Global Insights Journal: Jurnal Mahasiswa Hubungan Internasional

Volume 1 Nomor 1 Tahun 2024. Penelitian ini mengkaji peran IOM dalam upaya penanggulangan perdagangan manusia di Thailand selama periode 2021 hingga 2023. Dalam jurnal tersebut berisikan bagaimana penjelasan negara Thailand menjadi negara asal, transit, dan tujuan dalam jaringan perdagangan manusia di Thailand terus meningkat. IOM, sebagai organisasi internasional yang berfokus pada migrasi yang tertib dan manusiawi memiliki peran penting dalam membantu pemerintah Thailand menangani masalah ini. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis peran IOM dalam menanggulangi perdagangan manusia di Thailand pada periode 2021-2023 dengan fokus pada strategi dan program yang diterapkan, serta tantangan yang dihadapi. Pendekatan kualitatif deskriptif analitis digunakan dalam penelitian ini. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan perwakilan IOM dan pihak terkait lainnya, sementara data sekunder dikumpulkan melalui studi pustaka dari berbagai sumber seperti laporan resmi, jurnal ilmiah, dan publikasi lainnya. Penelitian ini mengidentifikasi beberapa peran utama IOM dalam upaya penanggulangan perdagangan manusia di Thailand:

1. Mekanisme Administratif, IOM membantu pengembangan *National Referral Mechanism (NRM)* di Thailand, yang bertujuan untuk memastikan koordinasi yang efektif antara berbagai lembaga dalam identifikasi dan perlindungan korban perdagangan manusia.
2. Saluran Komunikasi, IOM berperan sebagai fasilitator komunikasi antara pemerintah Thailand dan negara-negara lain melalui keterlibatannya dalam forum *Coordinated Mekong Ministerial Initiative Against Trafficking (COMMIT Process)* dan *Bali Process*. Forum-forum ini memungkinkan diskusi dan kerja sama regional dalam upaya penanggulangan perdagangan manusia.

3. Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas, IOM menyediakan pelatihan bagi aparat penegak hukum, petugas imigrasi, dan lembaga terkait lainnya untuk meningkatkan kemampuan dalam mengidentifikasi dan menangani kasus perdagangan manusia.
4. Perlindungan dan Reintegrasi Korban, IOM menawarkan bantuan langsung kepada korban, termasuk layanan media, konseling psikologi, dan dukungan reintegrasi ke masyarakat asal.

Dalam penelitian ini tertulis tantangan yang telah dihadapi, dengan berbagai upaya yang IOM lakukan dalam penanggulangan perdagangan manusia di Thailand, sebagai berikut:

1. Kurangnya koordinasi yang efektif antara berbagai lembaga pemerintah dan non-pemerintah seringkali menghambat respons yang cepat dan tepat terhadap kasus *human trafficking*.
2. Terbatasnya sumber daya finansial dan manusia membatasi kemampuan IOM untuk menjangkau semua korban dan area yang terdampak.
3. Beberapa aspek dari kerangka hukum Thailand terkait perdagangan manusia masih memerlukan perbaikan untuk memastikan penegakan hukum yang lebih efektif.

IOM memainkan peran krusial dalam upaya penanggulan perdagangan manusia di Thailand melalui berbagai inisiatif seperti pengembangan mekanisme rujukan nasional, fasilitasi komunikasi antar negara, pelatihan bagi aparat terkait, serta perlindungan dan reintegrasi korban. Namun tantangan seperti koordinasi antar lembaga yang kurang optimal, keterbatasan sumber daya, dan kerangka hukum yang belum sempurna masih menjadi hambatan dalam upaya tersebut. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kerja sama antara pemerintah Thailand, IOM, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengatasi tantangan-tantangan ini dan memperkuat efektivitas penanggulangan perdagangan manusia di Thailand.

Pembeda antara skripsi penulis dan pada jurnal tersebut yakni menitikberatkan pada peran IOM sebagai organisasi internasional dalam menanggulangi perdagangan manusia di

Thailand selama periode 2021-2023. Fokusnya adalah pada inisiatif dan program yang dijalankan oleh IOM, tantangan yang dihadapi, serta kontribusi IOM dalam kerangka kerja regional dan internasional. Sedangkan pada skripsi penulis mencakup strategi kolaboratif kedua negara, dampak perdagangan manusia terhadap sektor pariwisata Thailand, serta penerapan *Routine Activity Theory (RAT)*. Maka dari itu penulis ingin mengembangkan lebih lanjut mengenai peran organisasi internasional terhadap kedua negara yakni Indonesia dan Thailand.